

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) SINGKAWANG

Oleh:
RIFQY FADZRIN
NIM. E01108097

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

email: rifqyfadzrin@gmail.com

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Singkawang saat ini masih terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya. Melihat meningkatnya kasus narkoba di kota Singkawang tentunya masalah ini menjadi ancaman bagi masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015. Adapun tujuan dari program P4GN adalah untuk mewujudkan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015". Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang merupakan implementor dari program P4GN untuk wilayah kota Singkawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi program P4GN di BNN Kota Singkawang. Penelitian ini mengkaji tiga hal yang diambil dari enam variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn, ke tiga hal tersebut terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, dan (3) komunikasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil yang didapat dari penelitian ini, bahwa proses Implementasi Program P4GN belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, komunikasi BNN Kota Singkawang dalam bentuk sosialisasi dengan masyarakat kota Singkawang masih belum merata keseluruh kelompok masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi Program P4GN. Kemudian sumber daya manusia dalam hal personil pegawai BNN Kota Singkawang masih belum mencukupi sehingga kondisi seperti ini akan mempengaruhi efektifitas implementasi Program P4GN. Selain itu sumber daya mengenai fasilitas pendukung implementasi Program P4GN juga masih belum memadai. Sumberdaya anggaran juga masih sangat kurang sehingga menjadi kendala terhadap BNN Kota Singkawang untuk memasang iklan di koran, tes urin, menambah jumlah pengiriman pecandu yang akan di rehabilitasi, dan membuat spanduk mengenai informasi bahaya narkoba. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu BNN Kota Singkawang perlu meningkatkan komunikasi sehingga sosialisasi program P4GN kepada masyarakat semakin meluas, sumber daya manusia perlu mendapat perhatian, dan sangat diharapkan agar BNN Kota Singkawang secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan langkah-langkah sebagaimana yang telah diatur dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kata-kata Kunci: Implementasi, P4GN, Sumber daya, Komunikasi

ABSTRACT

The problem of drug abuse is happening in Singkawang is currently still going on the increase in every year. See the rising cases of drug abuse in Singkawang surely this problem became a threat to the public especially the young generation against drug abuse. To overcome these problems the Government issued Presidential Instruction No. 12 of 2011 on the implementation of the National Strategy and the prevention and eradication of Drug abuse and illicit traffic (P4GN) in 2011-2015. As for the goal of the program is P4GN to realize "Indonesia the country Drug-free by 2015". The National Narcotics Agency (BNN) Singkawang is the implementor of the program P4GN to Singkawang area. This research aims to know the factors that hampered in the process of implementation of the programme P4GN on BNN Singkawang. This study examines three things that were taken from six variable in the theory of Van Meter and Van Horn, to the three things associated with existing problems in field: (1) the standards and objectives of policy, (2) resources, and (3) communication between organizations. This research uses descriptive research methods with qualitative approaches. The technique of data collection is done with the interview, observation, and study the documents. The results obtained from this research, that the process of implementation of the Program has not been fully implemented with the P4GN good, BNN Singkawang communication in the form of socializing with the public are still not Singkawang evenly throughout all the community groups, there are many communities that haven't gotten socialization Program P4GN. Then human resources in terms of personnel officers of the BNN Singkawang is still not sufficient so that conditions such as these will affect the effectiveness of the implementation of the Program P4GN. In addition resources about facilities supporting Program implementation P4GN also is still not adequate. Budgetary resources are also still very less so that it becomes an obstacle against BNN Singkawang to put an ad in the paper, urine tests, increase the number of addicts who will be shipping in rehabilitation, and make banners about the dangers of drug information. As for the suggestions in this study i.e. BNN Singkawang need to improve communications so that socialization program P4GN to the community is increasingly widespread, human resources need to get attention, and it is expected that the BNN Singkawang continuously perform socialization and eradication of drug abuse with the steps as set in the programme for the eradication and prevention of the abuse of and Illicit Drugs (P4GN).

Keywords: Implementation, P4GN, Resources, Communication

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas masyarakat memang sulit untuk diperhatikan dan dipantau secara menyeluruh, berbagai macam kalangan mulai dari remaja hingga orang tua bahkan anak-anak usia dini. Pengaruh budaya luar seringkali membawa dampak negatif di lingkungan masyarakat seperti gaya hidup, perilaku, sopan santun, keimanan dan sebagainya, tetapi ada pula dampak positif. Dampak negatif tentunya menjadi masalah yang harus diwaspadai oleh orang tua terhadap anaknya. Oleh sebab itu orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anak agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal negatif dalam pergaulan. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam memberikan nasehat terhadap anaknya dan seorang anakpun akan lebih merespon nasehat orang tuanya jika pendekatan antara orang tua dan anak terjalin dengan baik.

Berangkat dari masalah pergaulan di masyarakat tentunya tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi bahkan menjadi masalah yang sangat serius bagi setiap individu, masalah serius tersebut adalah "NARKOBA". Bahaya narkoba bagi kesehatan manusia sangatlah berdampak buruk serta menimbulkan banyak keluhan sampai merenggut nyawa para penggunanya. Seiring

perkembangannya narkoba seringkali disalah gunakan diperjual belikan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat umum. Zat adiktif berbahaya ini kebanyakan diperjual belikan secara ilegal dikalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum bahkan pejabat pemerintah sekalipun. Masalah ini merupakan masalah yang sangat serius untuk kita hadapi bersama. Penyalahgunaan narkoba termasuk salah satu tindak kejahatan dan wajib diberantas demi menciptakan generasi muda yang sehat baik secara fisik, mental maupun moral. Apa jadinya bangsa ini jika masalah narkoba tidak ditanggulangi secara tegas masa depan bangsa dan negara akan terancam.

Indonesia tidak luput dari permasalahan tersebut, bahkan saat ini dijadikan pasar narkoba yang besar sehingga seluruh wilayah Indonesia menjadi semakin rawan dijadikan surga bagi para sindikat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran empuk bagi para pengedar, sebab harga jual narkoba di Indonesia cukup tinggi. Fakta mengungkapkan bahwa setiap tahun, kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan. Sudah banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Kemudian penyebab lainnya seperti

perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obat terlarang.

Menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2009 angka penyalahgunaan narkoba secara nasional adalah 1,99 % yaitu sekitar 3,6 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan sebesar 2,8 % menjadi 5,1 juta orang.

Dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada 2008 tercatat 233 kasus narkoba di Kalbar. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 230 kasus dan 2010 menjadi 200 kasus. Namun pada 2011, meningkat menjadi 273 kasus. Dan memiliki potensi untuk terus meningkat, mengingat pada triwulan pertama 2012 ini saja sudah terdapat 85 kasus.

Masuk ke daerah Kota Singkawang yang dikenal sebagai kota pariwisata di Kalimantan Barat menjadikan kota ini banyak dikunjungi turis domestik maupun mancanegara. Hal tersebut berdampak terbukanya jalur peredaran gelap dan jaringan transaksi narkoba. Jumlah data kasus narkoba dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Singkawang

menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tercatat 19 kasus kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2009 sebanyak 39 kasus dan naik lagi tahun 2010 sebanyak 46 kasus. Namun pada tahun 2011 menurun menjadi 32 kasus, kemudian pada tahun 2012 juga menurun menjadi 22 kasus, 2013 tercatat 20 kasus, dan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 27 kasus.

Dengan jumlah kasus tersebut dirasakan masih berada pada titik rawan, dan masih banyak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Singkawang. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat diharapkan selalu waspada dan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar kita serta lebih peduli jika melihat pemakai atau pengedar narkoba.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang kian hari semakin meningkat, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 – 2015. Program P4GN bertujuan untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” yang akan ditargetkan tahun 2015 mendatang.

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang?”

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang secara tidak langsung terlibat (Winarno, 2007:71). Masalah publik juga diartikan sebagai nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik (Dunn dalam Tachjan, 2008:58). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang

memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara konseptual, kebijakan publik dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2008:38-39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Lebih lanjut Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dunn (dalam Pasolong, 2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R. Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Pasolong, 2008:39).

Chaini Nasucha (dalam Pasolong, 2008:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial harmonis.

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kemudian Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009) juga menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumber daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya matrial (matrial resources), dan sumber daya metoda (method resources). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai

subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya.

d. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik dan agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e. Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon implementor terhadap kebijakan,

yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

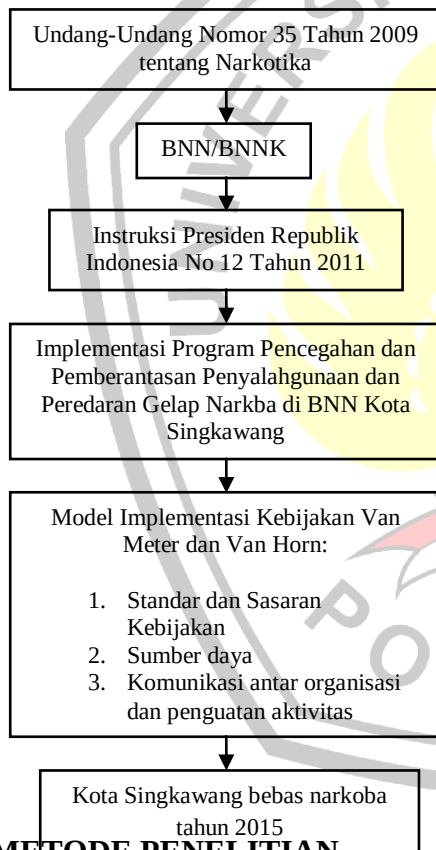
f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dengan demikian dalam penelitian ini penulis memilih tiga variabel dari teori Van Meter dan Van Horn tersebut diantaranya: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Ketiga variabel tersebut digunakan peneliti berdasarkan masalah yang terjadi dilapangan, mengenai standar dan sasaran kebijakan masih belum sepenuhnya bejalan dengan baik, masih banyak masyarakat kota Singkawang yang belum mendapatkan sosialisasi program P4GN, jumlah pegawai/staf BNN Kota

Singkawang yang melakukan penyuluhan masih belum mencukupi, hal ini terkait dengan masalah kurangnya sumber daya, kemudian komunikasi yang dilakukan BNN Kota Singkawang dalam bentuk sosialisasi masih belum meluas baru sebatas siswa dan belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat.

KERANGKA PIKIR



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis berbagai fakta dan fenomena yang terjadi,

bagaimana proses Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dari segi aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Tipe yang digunakan dalam teknik ini adalah tipe purposive sampling yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan BNN Kota Singkawang dalam pelaksanaan program P4GN kepada remaja/masyarakat di Singkawang dan subjek penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Singkawang
2. Perwakilan pegawai BNN Kota Singkawang yang melakukan penegakkan Implementasi dari program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Remaja/Masyarakat kota Singkawang.

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti

sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Untuk mendapatkan data dan fakta penelitian, maka peneliti menggunakan alat bantu berupa: pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *display data*, dan *verification*. Selanjutnya uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Terkait dengan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang, maka dari proses tersebut ditelaah dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di BNN Kota Singkawang

Implementasi terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktifitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Oleh karena itu implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pembuatan kebijakan merupakan langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, salah satu masalah tersebut yaitu masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang mengancam negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Badan Narkotika Nasional diberikan wewenang untuk mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang bahwa: "Tujuan program P4GN itu untuk menjadikan Indonesia negara bebas Narkoba tahun 2015 mendatang, kegiatan

yang kita lakukan untuk pencegahan dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelajar tingkat SLTA dengan membentuk kader anti narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba selalu menjadi ancaman untuk mereka, untuk saat ini kami lebih memfokuskan untuk melakukan pencegahan kepada pelajar, karena mencegah lebih baik dibanding mengobati”. Lebih lanjut Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Singkawang menjelaskan bahwa masalah peredaran narkoba di Kota Singkawang bukan hanya disebabkan oleh kinerja BNN Kota Singkawang tetapi ada faktor lainnya menurutnya bahwa: “Memang untuk masalah narkoba di negara kita ini yang diberikan tanggung jawab untuk menanganinya adalah BNN, narkoba ini masalah terbesar loh bahkan sampai tingkat nasional, bayangkan saja jika negara kita sampai lost generasi kehilangan massa, untuk kita yang tua sih memang sekarang belum merasakannya tetapi untuk dimasa kedepan nanti kita akan kehilangan generasi penerus jika misalnya penyalahgunaan narkoba sudah sampai masuk ke tingkat SMP, sangat bahaya sekali bila masalah itu terjadi akan banyak yang putus sekolah gara-gara narkoba, masalah ini berkaitan dengan lemahnya ketahanan negara kita, sehingga mengakibatkan terjadinya kecolongan masuknya narkoba dari negara tetangga”.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Singkawang diatas dapat dipahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat terutama generasi muda dan dapat menyebabkan negara kehilangan generasi penerus. Faktor ketahanan negara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga negara dari tindak peredaran narkoba yang datang dari negara luar. Ketahanan negara yang lemah dan terbatasnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan kemudahan bagi peredaran narkoba dari negara lain.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, BNN Kota Singkawang sudah bertindak nyata dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Peran nyata BNN Kota Singkawang yakni dengan memberikan sosialisasi bagi Pelajar SLTA, Mahasiswa dan Pekerja tentang bahaya penggunaan narkoba, kegiatan ini merupakan tindakan pencegahan. Mereka yang diikuti sertakan dalam kegiatan ini adalah yang belum terkontaminasi dengan narkoba, oleh karenanya sosialisasi mengenai bahaya dan dampak buruk akibat memakai narkoba penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelajar yang pernah mengikuti

kegiatan penyuluhan oleh BNN Kota Singkawang di sekolahnya, mengatakan bahwa: “Kami pernah mendapatkan sosialisasi dari BNN disekolah, kebetulan saya pernah mengikuti sosialisasi tersebut, ada sekitar 30 orang yang diikut sertakan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dari BNN, itupun sudah dipilih oleh guru siapa-siapa yang diikut sertakan, sepertinya sosialisasi ini agenda tahunan BNN karena selama saya sekolah disini sudah 2 kali BNN melakukan sosialisasi di sekolah kami”.

Dari hasil wawancara dengan pelajar SLTA di atas menjelaskan bahwa sosialisasi yang diberikan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang di Sekolah mereka sudah berlangsung sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 30 siswa dan sekaligus menjadi kader anti narkoba disekolah mereka. Kader-kader anti narkoba tersebut ditugaskan untuk menyebarluaskan kepada teman, keluarga, dan masyarakat sekitar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba jika mengacu pada tujuan dari Inpres Nomor 12 Tahun 2011 adalah untuk menangani masalah narkoba agar tidak semakin berkembang dengan melakukan tindakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi,

dan pemberantasan. Dan menurut hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang bahwa tujuan program ini adalah untuk menjadikan Indonesia bebas narkoba tahun 2015 mendatang khususnya kota Singkawang.

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung BNN Kota Singkawang dalam Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Tersedianya sumber daya pada suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam mendukung proses keberlangsungan kebijakan, tetapi apabila implementor kurang sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi itu tidak dapat berjalan secara efektif, sehingga akan menghambat proses implementasi. Minimnya sumber daya hanya akan membuat kebijakan menjadi kata-kata saja dan tidak dapat direalisasikan. Ada tiga faktor penting dalam sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana.

Kualitas kebijakan dengan dukungan sumber daya yang memadai tentunya akan memberikan hasil mencapai keberhasilan, tetapi apabila dukungan sumber daya

kurang memadai maka akan memberikan hasil sebaliknya. Secara birokrasi ketersediaan sumber daya pada Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang sudah tersedia namun ketersediaan anggaran dana sehubungan dengan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba masih dirasakan kurang. Hal ini didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Singkawang. Sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: “Untuk anggaran dana program P4GN di BNN Kota Singkawang selalu ada setiap tahunnya, tetapi belum mencukupi secara keseluruhan, bagaimana kita memberi penyuluhan, memasang iklan di koran, membuat sependuk jika anggaran masih belum mencukupi, bila perlu anggaran lebih ditingkatkan lagi dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini saja (2014) kami tidak ada melakukan tes urin dan juga memasang iklan di koran”.

Sumber daya yang utama dalam implementasi program adalah sumber daya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang

sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Secara umum sumber daya manusia pada Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dirasakan masih kurang mencukupi, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang sebagai berikut: “Mengenai sumber daya manusia kami rasakan kurang, setiap kasi masing-masing dari kami hanya memiliki satu orang staf saja kecuali dipencegahan ada dua staf, kami juga yang mengolah data begitupun saat mengadakan kegiatan kami juga yang turun kelapangan, sebenarnya setiap kasi memiliki lima staf, walaupun demikian dengan SDM yang ada saat ini kami tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami”.

Dari hasil wawancara di atas mengenai sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dapat diketahui bahwa jumlah pegawai atau staf masih sangat kurang, masing-masing kasi hanya memiliki satu staf sedangkan yang seharusnya setiap kasi memiliki 5 staf. Jumlah staf yang kurang memadai akan menyebabkan implementor menjadi tidak fokus dengan pelaksanaan kebijakan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu staf BNN Kota Singkawang diatas bahwa dengan jumlah staf yang tidak mencukupi menyebabkan staf

tersebut merangkup tugasnya sebagai pengolah data maupun penyuluh dilapangan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi efektifitas implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sumber daya manusia dalam suatu kebijakan sebagai mana yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Metter bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang didisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka sangat sulit untuk diharapkan.

Untuk mengatasi masalah kurangnya pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang tersebut dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu staf Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang diperoleh keterangan sebagai berikut: “Mengatasi masalah kekurangan staf di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang ini sudah kami

lakukan dengan mengajukan permohonan ke pusat, dengan demikian nantinya akan lebih melengkapi jumlah pegawai di setiap bidang yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu staf di Badan Natkotika Nasional Kota Singkawang di atas mengatakan bahwa dalam menangani masalah kekurangan staf mereka sudah mengajukan permohonan ke pusat. Sehingga nantinya akan lebih meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diimplementasikan.

Dengan demikian sumber daya manusia yang ada pada Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dalam upaya mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba mengalami kendala kekurangan personil di setiap bidangnya. Jumlah tersebut masih dirasakan minim jika dibandingkan dengan jumlah pelajar, mahasiswa, dan pegawai negeri maupun swasta yang ada di Kota Singkawang sehingga implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba tidak berjalan secara efektif. Kemudian untuk sumber daya anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang masih dirasakan kurang sebagaimana yang telah disampaikan dalam wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang di atas.

3. Komunikasi BNN Kota Singkawang dengan Pihak Terkait dalam Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Komunikasi antar organisasi atau badan pelaksana menunjuk pada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Selain itu suatu program akan dapat dipahami secara positif oleh masyarakat apabila penyampaian informasi tentang program tersebut berjalan dengan baik. Proses komunikasi antara pelaksana program dengan penerima program dalam hal ini antara Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dengan masyarakat kota Singkawang sangat diperlukan. Dengan komunikasi maka maksud, tujuan serta isi program dapat diketahui dan dipahami secara benar oleh masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pelajar, lingkungan kerja negeri maupun swasta, dan pecandu yang ada di kota Singkawang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang sebagai berikut: “Untuk komunikasi dalam hal pencegahan pertama kami menetapkan lokasi yang menjadi target dalam melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba, yaitu memilih sekolah-sekolah yang ada di kota Singkawang, selanjutnya memberikan konfirmasi kepada sekolah-sekolah yang telah kami tentukan, kemudian membentuk kader-kader anti narkoba yang mana kader-kader inilah yang nantinya menjadi kepanjangan tangan dari kami, sampai saat ini hampir semua sekolah diberi pemberitahuan bahwa kami dari BNN Kota Singkawang akan melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi mereka. Dan respon dari pihak sekolah cukup baik dan sangat mendukung kegiatan ini”.

Selanjutnya salah satu target sosialisasi dari BNN Kota Singkawang tersebut adalah pelajar SLTA yang sudah ditunjuk dari sekolah sebagai kader-kader yang akan mengikuti sosialisasi dari BNN Kota Singkawang. Terbentuknya kerjasama antara BNN Kota Singkawang dengan sekolah-sekolah SLTA yang ada di kota Singkawang memberikan dampak

positif. Dukungan seperti ini menunjukkan kesadaran serta kepedulian pihak sekolah terhadap masa depan siswa-siswi mereka. Melihat pergaulan remaja di era modernisasi sekarang ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak Sekolah maupun orang tua murid terkait masalah peredaran narkoba. Dalam hal ini BNN Kota Singkawang mengambil sikap dengan memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi pelajar SLTA agar tidak ikut terpengaruh melakukan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Singkawang merupakan upaya pencegahan terhadap pelajar SLTA terkait program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Disisi lain terdapat kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh BNN Kota Singkawang kepada pelajar, seperti yang ungkapkan oleh salah satu pelajar yang menjadi kader mengatakan bahwa: “Ketika kami mengikuti sosialisasi yang diadakan BNN Kota Singkawang di sekolah, kami diberikan berbagai informasi mengenai bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya lalu dari apa yang telah disosialisasikan BNN Kota Singkawang kami diminta untuk menyampaikan kembali kepada teman-teman lain tentang sosialisasi yang diberikan, tetapi setelah kegiatan ya langsung bubar ke kelas

masing-masing dan tidak kami sosialisasikan kepada teman-teman”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan siswa lainnya yang pernah mengikuti sosialisasi dari BNN Kota Singkawang juga mengatakan hal serupa: “Selama kegiatan sosialisasi berlangsung BNN Kota Singkawang menjelaskan kepada kami tentang dampak buruk pemakaian narkoba terhadap kesehatan dan fungsi syaraf manusia, kemudian kami diperlihatkan gambar macam-macam jenis narkoba, yang diberikan dari BNN Kota Singkawang selain sosialisasi yaitu konsumsi berupa nasi kotak, untuk brosur dan buku tentang narkoba tidak ada. Tidak ada pamflet tentang narkoba yang terpasang dimading sekolah kami, yang ada hanya plang bebas narkoba di halaman sekolah kami”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar SLTA di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan BNN Kota Singkawang terhadap siswa yang dibentuk sebagai kader untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dirasakan masih belum optimal. Masalah ini terkait dengan pemahaman siswa tentang narkoba masih belum maksimal, kemudian kader-kader anti narkoba yang dibentuk perlu mendapatkan pelatihan, artinya BNN Kota Singkawang tidak hanya memberikan sosialisasi semata.

Kurangnya sarana publikasi yang diberikan BNN Kota Singkawang seperti pamflet, sependuk, baliho atau buku-buku tentang bahaya narkoba juga menjadi faktor lemahnya komunikasi. BNN Kota Singkawang juga belum memiliki website atau situs. Komunikasi dalam bentuk informasi melalui media cetak maupun elektronik merupakan cara yang dapat membantu BNN Kota Singkawang dalam memberikan sosialisasi secara meluas. Perlunya informasi melalui media cetak dan media elektronik dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Standar dan sasaran kebijakan terkait dengan tujuan kebijakan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang adalah untuk menjadikan kota Singkawang bebas dari narkoba dengan melakukan tindakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan utama dari program P4GN yaitu menuju “Indonesia Bebas Narkoba 2015”.
2. Sumber daya manusia yang ada di BNN Kota Singkawang masih sangat minim, dalam hal kualitas sumber daya manusia secara akademis dan secara jenjang pendidikan sudah baik. Namun dalam hal kuantitas, sumber daya petugas penyuluh lapangan masih sangat kurang. Bila dibandingkan dengan luas wilayah maka sangat tidak proporsional. Sumberdaya anggaran juga masih sangat kurang sehingga menjadi kendala terhadap BNN Kota Singkawang untuk memasang iklan di koran, tes urin, menambah jumlah pengiriman pecandu yang akan di rehab, dan membuat sependuk mengenai informasi bahaya narkoba.
3. Komunikasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang dalam mengkoordinasikan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada pihak sekolah sudah cukup baik, pihak sekolah sangat mendukung kegiatan sosialisasi yang akan diberikan BNN Kota Singkawang kepada siswa mereka. Namun sosialisasi yang dilakukan kepada siswa belum optimal, karena sosialisasi belum terlaksana secara intensif dan merata di setiap sekolah. Kurangnya sarana

publikasi dari BNN Kota Singkawang seperti pamflet, sepanduk, atau buku-buku tentang bahaya narkoba juga menjadi penghambat meluasnya informasi.

b. Saran

1. Dalam proses implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang terkait dengan standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku, namun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dan sosialisasi program P4GN yang belum merata. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan secara terus menerus yang dilakukan BNN Kota Singkawang dalam memberikan sosialisasi program P4GN.
2. Faktor sumber daya merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas personil atau staff di Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang. Disamping itu penambahan tenaga personil staff di BNN Kota Singkawang juga perlu ditingkatkan agar sosialisasi yang

dilakukan lebih komperhensif kepada masyarakat.

3. Perlu adanya peningkatan kualitas komunikasi yang dilakukan khususnya komunikasi kepada masyarakat terutama dalam bentuk sosialisasi. Hal ini agar masyarakat khususnya pelajar dapat memahami dengan baik tujuan dari Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kemudian meningkatkan sarana publikasi P4GN melalui berbagai media seperti internet, iklan di koran, sepanduk/baliho dan brosur, sehingga informasi program P4GN akan lebih mudah didapat oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2011. *Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan*. Jakarta: BNN.
- Faisal, Sanafiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Fajri, Riyan. 2011. *Kewenangan Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Di Wilayah Hukum Polresta Padang)*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hakim, Alim Rahman. 2013. *Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pontianak Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Narkoba Pada*

Kalangan Remaja di Pontianak.
Pontianak: Fisip Universitas
Tanjungpura.

*Peredaran Gelap Narkoba Tahun
2011-2015.*

Mansyur. 2007. *Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Dibidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kebijakan Publik Di Kabupaten Ketapang.* Pontianak : Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.

Moleong, J Lexy. 2007. *Meteologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: CV Alfabeta.

-----, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2000. *Pengantar Kebijakan Negara.* Jakarta: Rhimena cipta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Internet:

B4djul, Kaskus. 2011. *Polres Singkawang Masih Endus Pabrik Narkoba.*
<http://archive.kaskus.co.id/thread/10522117/0>. Diakses 21 Desember 2013

BNN, Bnn.go.id. 2010. *Sejarah Badan Narkotika Nasional.*
<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8005/sejarah-bnn>. Diakses 08 Agustus 2013

Peraturan Perundang Undangan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2010. *Inpres No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.*

Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2011. *Inpres No 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rifqy Fadzrin
NIM / Periode lulus : E01108097/IV
Tanggal Lulus : 23 Desember 2014
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Rifqyfadzrin@gmail.com / 085750970666

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) SINGKAWANG

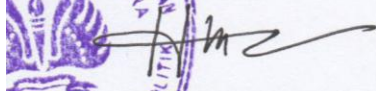
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

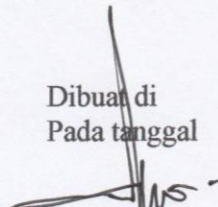
untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 23 Juni 2015


Rifqy Fadzrin
NIM. E01108097

Catatan :
*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)